

Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku,
Tentang Maluku,
Untuk Indonesia



**Fahmi Salatalohy
& Rio Pelu (ed.)**



LKIS

**NASIONALISME KAUM PINGGIRAN
Dari Maluku, Tentang Maluku,
Untuk Indonesia**

Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku,
Tentang Maluku,
Untuk Indonesia

Fahmi Salatalohy
& Rio Pelu (ed.)



LKIS

NASIONALISME KAUM PINGGIRAN
Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia
Fahmi Salatalohy & Rio Pelu (ed.)
© Saniri Satu Rasa (Satusa) dan LKiS

xxviii + 220 halaman: 13 x 18,5 cm

1. Politik dan Budaya Lokal
2. Multikulturalisme
3. Nasionalisme dan Kebangsaan

ISBN: 979-3381-44-2

Editor: Fahmi Salatalohy & Rio Pelu
Rancang Sampul: Kuss Indarto
Setting/*Layout*: Santo

Penerbit:
LKiS Yogyakarta
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 419924/0822743992
e-mail: elkis@indosat.net.id

Bekerja sama dengan Saniri Satu Rasa (Satusa)
Jl. Kaliurang KM. 7 Lorong Sinai No. 8 Sengkan
Sleman Yogyakarta

Cetakan I: Januari 2004

Percetakan dan distribusi:
LKiS Yogyakarta
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 419924/0822743992
e-mail: elkis@indosat.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Belum menjadi Indonesia. Tampaknya ungkapan itu tepat untuk menggambarkan Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaannya, sejak puluhan tahun silam. Bila Soekarno menggambarkan kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas menyongsong masa depan yang lebih baik, toh hingga hari ini kedamaian masih saja seperti barang antik, susah di cari, simbol kemewahan, dan (tentu) mahal harganya. Kalau kemudian tampak disana-sini tersedia kemewahan, kebanyakan hanyalah sebuah repro, imitasi. Kedamaian, baru tampak tersebar dalam ruang-ruang etalase, bukan yang sesungguhnya.

Kegerahan menyaksikan realitas yang mapan, nelecut cendekiawan muda Maluku yang sedang studi di Yogyakarta maupun Salatiga (Jawa Tengah) untuk melakukan transformasi dan "perlawanan". Buku yang ada di tangan pembaca ini, merupakan salah satu wujud

dari komitmen mereka yang tumbuh dari pergulatan dalam komunitas SATUSA (Saniri Satu Rasa).

Keluasan perhatian dan kepedulian mereka terhadap "kampung halaman" tampak menonjol dalam tema-tema beragam yang tersaji dalam buku ini. Topik-topik aktual yang terlibat ada dalam kajian tentang ketokohan Pattimura, privatisasi agama, budaya politik dan kebijakan pemerintahan, pendidikan hingga tema kebangsaan dan integritas lokal.

Kaum muda progresif dari bumi "penuh konflik ini menyebutkan bahwa buku ini merupakan antitesis dari buku-buku tentang Maluku yang tidak jelas arah dan tujuan serta sumbangsuhnya dalam penyelesaian konflik. Lebih dari itu, menjadi cermin wacana orang Maluku di perantauan dan sebagai media transformasi untuk membangun peradaban Maluku yang berkeadilan, humanis, dan religius. Dan yang tak kalah menariknya, sebagai komitmen untuk mengubah pola pikir dari tradisi tutur ke tradisi tulis.

Dalam konteks itulah, LKiS yang sejak awal memiliki komitmen membangun masyarakat transformatif, membuka kehidupan masa depan yang lebih demokratis, dan penuh penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, menyambut dan mendukung dengan kesungguhan dalam penerbitan ini. Karer kami meyakini bahwa melalui ruang dialog seperti yang tersaji dalam karya kawan-kawan muda Maluku ini akan mampu menjaga dan menghidupkan semangat intelektualitas, kejujuran, dialogis, dan terbuka.

Kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan SATUSA (Saniri Satu Rasa) yang berkenan menjalin kerjasama ini. Dan kami sangat respek dengan kehangatan mereka dalam mendialogkan segala hal untuk menghadirkan buku ini dihadapan sidang pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi obor pencerahan, kepada masyarakat yang lebih luas. Semoga.***

PENGANTAR EDITOR

Buku ini adalah bagian dari akumulasi kesadaran intelektual yang telah lama dirindukan. Kesadaran yang dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme, diangkat untuk menjawab berbagai persoalan kedaerahan, sekalipun di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang multivarian dan kontroversial, namun tujuannya normatif, kearah transformasi kultural sebagai ekspresi identitas lokal yang tertindas.

Gagasan pembuatan buku ini berasal dari beberapa teman cendekiawan muda asal Maluku yang sedang menempuh studi di Yogyakarta dan Salatiga, yang tergabung dalam Komunitas SATUSA (*Saniri Satu Rasa*) salah satu komunitas yang menjembatani dikotomi pemikiran egalitarian, anti-pluralisme, anti-multikulturalisme yang semakin meningkat intensitas gerakannya dewasa ini.

Lewat komunitas inilah tradisi transformatif mulai dikembangkan. Pertemuan dan diskusi-diskusi dilakukan secara kontinyu dengan pembedahan topik yang sangat beragam, mulai dari persoalan ketokohan Pattimura, persoalan privatisasi agama, budaya, politik dan kebijakan pemerintahan, pendidikan, sampai dengan masalah kebangsaan dan integritas lokal.

Dari tradisi ini kemudian melahirkan buku yang berjudul *Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku Tentang Maluku, Untuk Indonesia*

Tujuan diterbitkan buku ini, (1), sebagai antitesis terhadap beberapa buku sebelumnya yang mengula tentang Maluku, di mana tidak jelas arah dan tujuan serta sumbangsuhnya untuk menyelesaikan konflik, (2) merupakan cerminan wacana orang Maluku perantauan dan sebagai media transformasi untuk membangun peradaban Maluku yang berkeadilan, humanis dan religius, (3), sebagai komitmen untuk mengubah pola pikir dari tradisi tutur ke tradisi tulis terutama bagi generasi yang akan datang, agar mereka mampu mentransformasikan ide-ide progres kemudian diwujudkan dalam karya nyata, seperti halnya buku yang ada di tangan pembaca.

Ketika orang mendefenisikan identitas mereka dalam terma-terma etnik dan keagamaan, sebagai yang lain mungkin melihat hubungan itu sebagai lawan terhadap "mereka". Tetapi sebenarnya hubungan yang dikatakan sebagai "lawan" adalah keniscayaan yang harus disuarakan, dibedah dalam kontes

kemajemukan sehingga mencapai jalan keluarnya. Berbagai kearifan lokal dengan segala macam atributnya perlu ditempatkan dalam konteks yang strategis agar jangan sampai orang lain salah kaprah dan menganggapnya sebagai lawan.

Salah satu contoh adalah wacana Maluku merdeka atau tawaran-tawaran untuk membentuk wilayah federal, merupakan wacana kekinian yang harus diperjuangkan meskipun berbenturan dengan logika pemerintah. Karena di Maluku masih ada hak-hak polietnis yang dapat mempromosikan integrasi sosial dan persatuan, kewargaan. Dengan kata lain tuntutan mendasar yang melandasi hak-hak untuk memerintah sendiri bukanlah hanya berada dalam konteks beberapa kelompok yang merasa dirugikan di dalam komunitas politik namun tuntutan sebenarnya adalah lebih dari itu, bahwa kewenangan dari negara yang lebih besar tidak dapat diasumsikan untuk mendahului kewenangan dari komunitas bangsa konstituen. Apabila demokrasi adalah aturan "rakyat", tuntutan minoritas bangsa adalah lebih dari satu bangsa dan masing-masing mempunyai hak untuk mengatur diri sendiri.

Oleh karena itu, hak memerintah sendiri (federal) adalah sesuatu yang sudah harus dilengkapi dari kewargaan yang dibedakan selama ini. Karena negara sendiri telah membagi rakyat menjadi "rakyat-rakyat" terpisah, masing-masing dengan hak-hak, wilayah dan kekuasaan pemerintahan sendiri yang bersejarah, dan

oleh karenanya masing-masing harus hidup dan berkembang dengan komunitas dan sejarah politiknya pula.

Namun sejarah baru memperlihatkan bahwa sampai taraf tertentu identitas nasional harus diambil sebagai 'hadiah". Dari pemberian itu maka sifat identitas nasional dapat berubah secara dramatis, yang hanya dijadikan sebagai sarana rekayasa konstruksi sosial identitas bangsa. Dari hasil bentukan rekayasa itu maka akan melahirkan sikap politik yang mendua antara memilih negara yang ideal atau membentuk pemerintahan sendiri yang terhormat dan berwibawa. Bagian dari tuntutan komunitas politik itu adalah pilihan-pilihan untuk menyusun kerangka Maluku baru damai dan bebas dari arogansi kekuasaan yang kosmopolit.

Tuntutan komunitas warga Maluku adalah orientasi kritik murni dan ilmiah, tidak ada unsur-unsur tendensius, apalagi sampai mendapat pengaruh dari kekuatan politik Republik Maluku Selatan (RMS). Kritik ini untuk meremukkan stigma Republik Maluku Selatan, karena dinilai telah menciptakan sugesti "cacat bawaan" bagi masyarakat, maka tidak sepantasnya wacana Maluku merdeka diidentikkan dengan kemerdekaan hasil kloning Republik Maluku Selatan.

Asumsi para penulis dititikberatkan pada problematika ketidakadilan yang telah

ntang Maluku, Untuk Indonesia

ng harus hidup dan
dan sejarah politiknya

mperlihatkan bahwa
nasional harus diambil
erian itu maka sifat
a secara dramatis, yang
a rekayasa konstruksi
asil bentukan rekayasa
p politik yang mendua
deal atau membentuk
ormat dan berwibawa.
itas politik itu adalah
kerangka Maluku baru
ansi kekuasaan yang

arga Maluku adalah
niah, tidak ada unsur-
pai mendapat pengaruh
Maluku Selatan (RMS).
tigma Republik Maluku
nciptakan sugesti "cacat
aka tidak sepantasnya
diidentikkan dengan
publik Maluku Selatan.

dititikberatkan pada
ng telah lama dirasakan
penindasan terstruktur
dan feodalisme) yang

dilakukan pemerintah telah menggugah hati tokoh-tokoh muda Maluku untuk melakukan kritik balik terhadap pemerintah, dalam rangka mengorek naluri "kemanusiaan" pemerintah terhadap kehidupan masyarakat Maluku yang tertindas.

Gagasan tentang Maluku merdeka, lepas dari proses ideologi dan politik. Obyektifitas dan independensinya tetap pada wacana kritis dan akademis. Namun ketika wacana RMS itu menguat, maka pilihan-pilihan yang ditawarkan pun tidak bisa dihindari seperti menggagas dialog kultural atau mengajak pemerintah untuk berdialog dengan kelompok separatis.

Wacana "kemerdekaan" adalah cara lain yang ditempuh, dengan menggunakan senjata argumentasi obyektif terhadap situasi negara saat ini, tujuannya untuk menggugah kearifan pemerintah terhadap keterbelakangan, mendapat persamaan hak sebagai warga negara untuk menciptakan peluang-peluang konstruktif dalam proses pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Jika tidak demikian, maka lama kelamaan orisinalitas ke-Maluku-an bisa saja hilang dari pentas publik keindonesiaan.

Maluku yang mengalami marginalisasi beberapa dekade terakhir perlu mendapat "bidikan" khusus dari pemerintah karena berdasarkan beberapa indikator peran masyarakat mengalami disfungsi dalam sekat-sekat otonomi daerah. Otonomi yang mengambil bagiannya antara roti dan kerikil adalah belunggu, suatu

paket yang membungkus kebebasan dari ketidakberdayaan masyarakat Maluku untuk memperjuangkan hak-haknya secara arif dan lebih terbuka. Jika pemerintah tidak memprioritas kebutuhan dan menempatkan kearifan lokal sesuai dengan keinginan masyarakat maka suatu hal yang mesti dihadapi dengan segala konsekwensinya adalah klaim tentang ke-Indonesiaan harus dicabut dari wilayah Maluku.

Hal ini yang kemudian melahirkan sebutan "ancaman" terhadap nasionalisme atau lebih tepatnya memudarnya nasionalisme di daerah akibat arogansi penguasa. Penguasa sendiri yang telah membuka ruang ketidakpastian perubahan dalam negara sehingga masyarakat mau nasionalisme harus dipermasalahkan.

Menggugat nasionalisme atau mendaur ulang siklus integritas lokal, bukanlah perkara yang mudah karena masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu. Nasionalisme dan integritas lokal memiliki interdependensi satu dengan yang lain. Diantaranya nasionalisme harus memberikan jaminan keberlangsungan hidup, dan integritas lokal perlu menunjukkan sifat santunnya kepada nasionalisme dengan sendirinya terciptalah keadilan yang universal. Namun secara nyata, nasionalisme dengan paradigmanya yang begitu luas telah meredusir hak-hak integritas lokal terutama integritas masyarakat Maluku yang tersubordinasi di pinggiran kekuasaan. Nasionalisme menciptakan harapan-harapan masif yang

asan dan
ku untuk
f dan lebih
s kebutuhan
ai dengan
yang mesti
adalah klaim
ari wilayah

an sebutan
bih tepatnya
bat arogansi
nbuka ruang
ehingga mau
kan.

daur ulang
rang mudah,
tahuan yang
egritas lokal
n yang lain
kan jaminan
lokal perlu
asionalisme
yang univer
me dengar
eredusir hak
masyarakat
n kekuasaan
an masif yang

berujung pada anomali keutuhannya. Dengan pemikiran seperti ini masihkah kita berbicara tentang "moralitas" sesungguhnya, atau "realitas" sesungguhnya, tentang nasionalisme? kesungguh-sungguhan hanya bersifat lokal, partikular, komunitar, primordial dan parokial, sama sekali tidak dijamak oleh penyamaratan secara umum tentang hal-hal di atas.

Semua itu telah menggiring masyarakat Maluku sebagai kelompok manusia pinggiran. Siapa pun mereka, yang hidup, di tengah, di samping atau di puncak adalah jurang kehidupan yang sangat menyakitkan. Kaum pinggiran diberanikan untuk membongkar atau mendekonstruksi rasionalitas-rasionalitas opresif dan mengubah sejarah serta masyarakat melalui diskursus "kata-kata" mereka sendiri.

Sebagai kaum pinggiran setiap saat menetap nasionalisme dengan tetesan airmata, jika nasionalisme itu lautan, maka masyarakat Maluku adalah seonggak buih di tengah lautan itu. Lautan yang kaya dengan ikan, mutiara, terumbu karangnya, berbagai jenis bunga, bahkan lautan yang dapat dilayari oleh armada kecil sampai armada militer. Setumpuk buih hanya menjadi santapan arus atau badai, berputar dan hilang bersamaan dengan cuaca laut. Nasionalisme dan personifikasi di atas perlu dikritisi.

Kami tidak melihat Nasionalisme sebagai ancaman memudarnya integritas lokal secara global. Pasti ada kemampuan dan kelebihan nasionalisme untuk

Nasionalisme... 11 ...ig Maluku, Untuk Indone...

menetralisir riak-riak seperti itu. Akan tetapi sisi neo-kolonialisme dan liberalisme yang membung- raut wajah nasionalisme sedemikian rupa sehingga nasionalisme tidak mampu menengok orang-orang yang terpinggirkan. Nasionalisme dengan wajah kurus dan badan dekil hampir mati dalam genggamannya kolonialisme.

Buku ini juga mencoba membuka tabir budaya lokal, karena selama empat tahun budaya Maluku mengalami proses, "mundur sepuluh ribu", (*Retreat the Ten Thousands*). Dalam tahap pemudarnya ini diperlukan suatu diskursus yang intensif untuk mengembalikan spirit sejati: kerukunan, toleransi pluralisme dan orisinalitas budayanya. Budaya Maluku secara terus-menerus mengalami proses alienasi karena belum ada bentuk "kontrak sosial" untuk melakukan reformulasi sintesis terhadap semangat multikulturalisme dalam masyarakat.

Bagian dari tawaran-tawaran agar perlunya melakukan dialog kultural, seperti menghilangkan mitos terhadap sosok Pattimura, (karena klaim terhadap Pattimura lebih banyak menimbulkan arogansi desa-desa adat di Maluku), dan introspeksi terhadap kebijakan sosial politik, untuk mengangkat citra budaya lokal di digagas habis dalam buku ini.

Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Berney Adeney dan Usi Nona Risakotta yang dengan keikhlasannya telah bersama dengan kami dalam diskusi-diskusi di pondok Tali Rasa, Om Joh

Titaley yang telah ersedia memberikan pengantarnya pada buku ini, Om Said Tuhuleley, yang dengan tulus memberikan pemikiran-pemikiran segar dan pluralis, Bung Glen Engko yang telah menyediakan tempat untuk aktifitas komunitas Satusa, tak lupa ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan komunitas Satusa yang memiliki semangat untuk melakukan koreksi terhadap naskah buku ini, dan terakhir ucapan terima kasih kepada pihak penerbit LKiS yang telah mens-*support* penerbitan buku ini sehingga membuat mimpi kami tentang buku ini menjadi kenyataan.

Yogyakarta, Oktober 2003

Editor

Fahmi Salatalohy

Rio Pelu

DAFTAR ISI

Pengantar Perseksi	◆ v
Pengantar Editor	◆ vii
Kejapuran Sirih Tokoh Masyarakat	◆ xvii
Daftar Isi	◆ xviii

AGIAN I BUDAYA MALUKU DALAM DISKURSUS ◆ 1

Belajar Dari Kasus Aceh Menggagas Dialog
Kultural

Hasbullah Toisuta ◆ 3

Persinggungan Identitas Lokal Dengan Kekuasaan
Negara Sebuah Kecurigaan Hermeneutik

Abdin Wakano ◆ 13

Budaya POP Maluku

Rudolf Rahabest ◆ 21

Membangun Etika Multikulturalisme

Fahmi Salatalohy ◆ 27

Menjernihkan Kembali Ruang Hidup Maluku

Rudolf Rahabest ◆ 33

BAGIAN II SOSIAL POLITIK & KEMASYARAKATAN ♦ 39

Masyarakat Post Etnik

Rudolf Rahabeat ♦ 41

Membangun Sikap Keberagaman Yang Saling

Menyapa

Hasbollah Toisuta ♦ 47

Maluku Baru dan Peran Media Politik

Fahmi Salatalohy ♦ 57

**Demokratisasi Potensi Jender dalam Pemberdaya
Perempuan dan Masyarakat**

Eka Dahlan Ur ♦ 65

**Menata Kembali Relasi Polisi-Masyarakat di Maluku
(Kritik atas “ketidak berdayaan” Polisi mengatasi
Konflik Maluku)**

M. Abdul Nahumarury ♦ 75

BAGIAN III PERSOALAN PENGUNGGSI ♦ 83

Kebijakan Pemerintah Mengenai Persoalan

Pengungsi Dibidang Pertanahan Di Maluku Akibat

Konflik

Rio Pelu ♦ 85

**Penanganan Pengungsi dalam perspektif Hak Asasi
Manusia**

Theo Litaay ♦ 91

Ibu Negeri Tanah Maluku

Weldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ♦ 101

BAGIAN IV OTONOMI DAERAH ♦ 107

Pemekaran Wilayah, Roti atau Kerikil

Fransz Siahaya ♦ 109

**Federalisme, Jawaban terhadap Tuntutan
Disintegrasi Bangsa**

Abubakar kabakoran ♦ 115

Otonomi Daerah dan Implikasi terhadap Partai Politik

Theo Litaay ♦ 137

BAGIAN V SERI DIALOG 1 : REFLEKSI KEMERDEKAAN ♦ 147

Refleksi 17 Agustus Bagi Masyarakat Maluku

Rio Pelu ♦ 149

Apa Arti Merdeka Bagi Maluku

Weldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ♦ 155

Emansipasi Kemanusiaan Maluku

Abidin Wakano ♦ 163

**BETA ORANG MALUKU (Catatan Pinggir Terhadap
Etnisitas dan Eksistensi Orang Maluku**

Yance Rumahoru ♦ 167

**Mencari Kemerdekaan? Belajar Dari Orang
Papua**

Fahmi Salatalohy ♦ 175

SERI DIALOG 2 : BUDAYA MALUKU

Raibnya Integritas Lokal

Fahmi Salatalohy ◆ 189

“Tanggapan” Raibnya Integritas Lokal

Berney Adeney-Rissakotta ◆ 195

Memperjelas Budaya Lokal

Weldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ◆ 201

Tanggapan Balik Tentang Integritas Lokal

Fahmi Salatalohy ◆ 205

SERI DIALOG 3 : TENTANG PATTIMURA ◆

Rudolf Rahabeat ◆ 212

Abidin Wakano ◆ 214

Tentang para Penulis ◆ 217

MEMBANGUN ETIKA MULTIKULTURALISME

Oleh : Fahmi Salatalohy

Yang menjadi persoalan politik, etika, sosial, filosofis masa kini bukanlah upaya membebaskan individu dari pemerintah dan dari institusi pemerintah atau dari bentuk individualisasi yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kita perlu mengangkat bentuk-bentuk baru subyektifitas dengan cara menolak bentuk individualitas ini yang telah dipaksakan kepada kita selama beberapa abad.

Oleh karena itu ada tiga alasan yang menjelaskan mengapa etika multikulturalisme perlu dibangun dalam rangka menancapkan kebebasan ego lokalisme dari proses alienasi sejarahnya; pertama, persoalan etnologi (kajian tentang eksistensi etnis) kurang mendasar, sehingga sangat sulit untuk memetakan apakah kita masyarakat bangsa atautkah masyarakat etnis, kedua, modernitas budaya dapat dipastikan tergusur akibat

tidak adanya konfigurasi etika masyarakat yang memadai, dalam konteks ini kita belum mampu meramalkan keberlangsungan hidupnya etika dalam struktur yang kian kompleks, ketiga, dalam etika multikulturalisme dibutuhkan suatu kelas sosial yang memiliki energi revolusioner untuk melakukan seruan etika multikultural pada keadaan mereka sendiri dan menjadi pembawa revolusi bagi masyarakat.

Alasan yang pertama menurut saya adalah sangat fundamental untuk di kaji secara intensif, substansinya adalah apakah sudah ada kesadaran tentang eksistensi sebuah etnis, atau kita terbagi habis oleh bipolarisasi kekuatan kebangsaan? Saya tidak mengatakan bahwa persoalan kebangsaan dewasa ini adalah hal yang sensitif untuk dipeta konflikkan lewat analisa atau konsep-konsep akademis yang semakin tajam, karena jangan sampai kita tidak mampu menjelaskan tentang kedudukan hak-hak generasi mendatang yang ingin mengetahui lebih mendasar persoalan-persoalan identitas etnis-nya.

Ernest Renan menjelaskan bahwa, nasion adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas manusia-manusia yang saling merasa bersestakawan dengan satu sama lain. Nasion adalah suatu jiwa, suatu asas spritual, ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan yang oleh manusia-manusia yang bersangkutan bersedia di buat dimasa depan. Nasion mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan

dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu suatu nasion tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi atau hal-hal lain yang sejenis. Kehadiran suatu nasion, lanjut Renan, adalah suatu kesepakatan bersama yang seolah-olah terjadi setiap hari antara manusia-manusia yang bersama-sama mewujudkan nasion yang bersangkutan.

Konsepsi nasion yang dikembangkan oleh Renan beranjak dari pengalaman sejarah, misalnya sejarah republik Indonesia yang terbentuk pada kekuatan solidaritas kolektif etnis-etnis lokal. Pembentukan Indonesia adalah atas jasa etnisitas, bukan sebuah konsepsi yang mengharubirukan pemahaman kita selama ini, kalau tanpa kekuatan etnis, saya yakin republik ini tidak bisa terbentuk.

Konsepsi kebangsaan kala itu adalah muncul dari keinginan untuk mempersatukan golongan-golongan penduduk yang beraneka ragam di kepulauan nusantara. Perjumpaan sebuah republik saat itu, menurut hemat saya sangat tidak seimbang atau cenderung dipaksakan, karena apa yang kita kenal dengan kekuatan negara tidak dapat memberdayakan dirinya jika tidak ada kekuatan etnis. Oleh karena itu semenjak terbentuknya sebuah negara menjelang beberapa dekade terakhir tuntutan untuk melakukan transformasi etika masyarakat kultural kembali menguat dengan gagasan-gagasan agar republik yang

telah dibentuk itu harus mengembalikan citra etnisitas, karena sama-sama melakukan konsensus bersama.

Penemuan kebebasan manusia dalam konteks Indonesia sekarang memerlukan perebutan pengetahuan dan keahlian atau pemupukan modal intelektual pada kecepatan tinggi. Tanpa pemupukan kecepatan tinggi itu manusia Indonesia akan tetap harus meraba-raba di atas warisan alam yang diselimuti kegelapan.

Tanpa koreksi ketimpangan selama ini akan muncul pembalasan dendam suatu ketika, seraya menyudutkan kebebasan. Karena itu batas-batas ketimpangan yang diletakkan selama ini secara politik adalah perlu bagi kemerdekaan yang berkelanjutan. Supaya kemerdekaan dapat berbuah keadilan dan pembagian hasil adalah syarat yang perlu. Orde kebebasan tidak seluruhnya baru bagi rakyat Indonesia. Paling tidak dalam beberapa masyarakat seperti kita kemerdekaan manusia adalah bagian dari nilai dasar yang dijunjung tinggi. Konsep kemerdekaan pun pada mulanya terkait erat dengan kemerdekaan manusia sebelum membelot ke kemerdekaan bangsa.

Landasan fundamental kedua adalah , bagaimana kita dapat menyusun sebuah konfigurasi budaya agar budaya itu sendiri tidak tergusur? menurut pandangan Hans Jones seorang tokoh etika masa depan yang berasal dari Jerman mengemukakan "tanggung jawab ke masa depan itu tidak dapat di dasarkan atas prinsip keadilan dan hak-hak generasi mendatang. Mengapa tidak ? keadilan sebagai tuntutan untuk memberikan

kepada siapa saja apa yang menjadi haknya (misalnya agar generasi mendatang) mewarisi bumi (saya menafsirkan bumi adalah etika) dalam keadaan yang tidak lebih buruk dari pada waktu kita mewarisinya, atau dalam keadaan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemanusiaan mereka sama dengan kita, tergantung dari hak yang bersangkutan.

Dari argumentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa etika multikultural pada prinsipnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Perbedaan agama, suku, dan ras perlu (substansinya yang samar) perlu diperdebatkan, (selain agama, dalam konteks tertentu saja), karena pertanggungjawaban itu masih terperangkap dalam sublimasi struktur dan kevakuman mental masyarakat. Untuk etika multikultural, batas-batas penghayatan, budaya dan kondisi kejiwaan membutuhkan proses kritik balik. Etika multikultural tidak mungkin hidup dalam iklim budaya yang paranoid, tegang dan terkebelakang. Kita dikekang oleh ambuigitas yang sesat, batin yang tidak merdeka yang tertindas.

Landasan ketiga, kita membutuhkan kekuatan revolusioner yang mendobrak hirarkis sosial yang stagnan selama ini. Implikasi budaya yang menjerumuskan kekuatan primordial ke rana antagonis perlu dipertanggungjawabkan dengan membuat perangkat etika multikultural.

Dalam hal ini sudah barang tentu kita memerlukan konsep-konsep yang komprehensif tentang etika dan

penerapannya bagi masyarakat. Kekuatan-kekuatan primordial yang anti penerapan etika multikulturalisme harus menyambut pasti pembentukan kebutuhan seperti ini, karena tidak mungkin kita hidup dalam ketidakpastian peradaban yang tidak ber-etika.

MALUKU BARU DAN PERAN MEDIA POLITIK

Oleh: Fahmi Salatalohy

Media politik bukan dipahami sekedar persoalan penekanan emosi atau bentuk-bentuk perusakan terhadap tatanan pemerintahan yang gencar terjadi dewasa ini. Kini beragam media tengah membangun segenap sistem yang sama pentingnya bagi masyarakat. Sudah barang tentu dengan berbagai versi dan tingkat intensitas yang sangat beragam.

Perkembangan yang dinamis dari media menyebabkan apa yang para akademisi sebut "*second reality*" yaitu penciptaan model-model realitas yang ditentukan oleh media.

Media politik atau sebut saja "jurnalisme politik" tidak terlepas dari gesekan-gesekan dramatis dimana unsur realitas dan obyektifitasnya sering dikesampingkan guna pembenaran atau pencapaian tujuan politik. Dalam konteks itulah mengapa dalam masyarakat yang terbuka sekarang ini sangat diperlukan komunikasi

media dalam suatu kondisi politik yang sudah semakin membaik.

Apa yang disebut sebagai "*media society*" telah hadir melayani meningkatnya kebutuhan untuk mengintegrasikan dunia yang dipisahkan oleh semakin banyak kepentingan politik. Pada "*media society*" terbentuk struktur-struktur spesifik yang sangat berpengaruh terhadap integrasi lokal dan konflik politik. Selain mengintegrasikan, sistem media yang kompleks juga membangun identitas budaya, agama dan politik yang berbeda.

Media politik pada hakekatnya adalah sarana sekaligus sumber yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena sebagai sarana media, politik juga memiliki resonansi kejiwaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka dimana dan untuk apa media itu dipergunakan.

Secara sosiologis, media politik mampu mencerminkan jenis-jenis kejiwaan masyarakat dimana gerakan-gerakan yang mengarah pada kehancuran media politik mampu dieliminir dalam rangka perwujudan stabilitas politik. Mungkin sebagian diantara masyarakat memiliki perasaan enggan untuk melakukan transformasi politik lewat media yang diciptakan sendiri, atau media politik yang secara sah telah ditetapkan oleh penguasa. Dalam konteks ini kepentingan untuk menyalurkan "keinginan" masyarakat mengalami hambatan, karena corak media politik sendiri sangat ditentukan oleh perangkat-

perangkat kekuasaan, seperti militer dan hukum ditambah dengan superioritas penguasa yang sebenarnya alat dan sifat kekuasaan itu tidak memiliki hak sama sekali untuk mengatur politik masyarakat.

Kita jangan lupa, dalam media politik juga ada hirarki terselubung, dimana masyarakat sebagai deklarator politik "dihabiskan" hak-haknya untuk berkreasi, tidak diberikan ruang bebas untuk mengemukakan argumentasi-argumentasi politiknya. Masyarakat dengan segala bentuk kesadaran komunalnya perlu mendapat mandat politik meskipun dalam suatu tatanan kekuasaan yang tidak demokratis sekalipun. Memang penting sekali apresiasi media dan pendidikan politik agar masyarakat tidak menjadi korban diantara keduanya.

Untuk menentukan kepastian politik dan menghindari kesenjangan dalam segmen komunal masyarakat seperti itu, maka media politik jangan sekali-kali menyembunyikan kegairahan masyarakat apalagi media politik yang meskipun tidak sevalid media yang dibentuk oleh penguasa.

Demokratisasi media politik adalah keniscayaan yang sesungguhnya mampu mengangkat citra jurnalisme politik dan citra masyarakat. Ketika kedua elemen ini saling mempengaruhi kerap pula terjadi kesenjangan. Kesenjangan yang memperlihatkan perbedaan dalam paham demokrasi melahirkan suatu kutub. Satu kutub memunculkan perbedaan yang konstruktif namun dikutub lain mengarah pada

antagonistis atau permusuhan. Kedua kutub perbedaan itu dapat memunculkan situasi krisis politik dan krisis komunikasi, walaupun krisis komunikasi yang dimunculkannya berbeda gradasinya.

Bagaimana kita dapat menghubungkan situasi seperti ini atau minimal mengakumulasi peran media politik di wilayah-wilayah yang mengalami konflik ?

Pertama; yang harus diperhatikan adalah; bagaimana menjustifikasi kifrah media politik sebagai wadah pengembangan diri masyarakat agar terhindar dari benturan-benturan kepentingan elit politik. Justifikasi peran, artinya media politik diberikan kepercayaan untuk melakukan transformasi pemberitaan sesuai dengan etika jurnalismenya dengan jalan menghindari "teror politik" atau kebenaran prinsipil pemberitaan yang dipangkas dengan kekuatan teror.

Kedua; media politik sebagai sarana menuju proses demokratisasi yang mandiri tanpa batas dan kontrol dari siapapun, jika orientasi media politik lebih cenderung diklaim oleh kepentingan politik penguasa maka prinsip-prinsip media politik yang adil, jujur dan transparan menjadi stigma dan tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemandirian jurnalisme politik sebagai lembaga yang otonom.

Ketiga; menentukan periodisasi keberlangsungan media politik dalam pola pengambilan keputusan, dalam hal ini media politik diperhadapkan pada

tantangan normal tidaknya situasi politik yang sedang berlangsung.

Persoalan periodisasi politik perlu dikalkulasi secara matang karena berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan hal-hal teknis dalam politik. media politik memiliki hak otonom untuk kegiatan penyebaran informasi yang berkaitan dengan penataan kondisi hidup matinya jurnalisme politik, jika situasi politik normal maka jurnalisme politik akan hidup, akan tetapi sebaliknya jika muncul stagnasi maka peran-peran penting jurnalisme politik dengan sendirinya akan mati suri.

Ketiga peran ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat atau jurnalis politik dan penguasa untuk menghindari posisi tawar-menawar kepentingan yang berujung pada konflik. Dalam konteks inilah maka saya melihat situasi politik di Maluku cenderung mengambil alih peran media, bahkan perlindungan terhadap publik figur semakin nyata di ekspos oleh mereka yang terlibat dalam operasionalisasi media politik.

Kita harus mengoptimalkan peran media politik yang jujur, agar media politik sendiri bermartabat. Situasi di Maluku sekarang ini sudah membaik dengan kebijakan pencabutan Darurat Sipil ke Tertib Sipil, adalah suatu pra kondisi yang melibatkan peran media politik, artinya, jika kita ingin menjaga status Darurat Militer, konteksnya terletak pada apresiasi media sendiri. Dalam hal ini menyangkut dengan pemberitaan dan partisipasi media politik untuk saling

menjaga normalisasi keadaan yang ada. Saya percaya peran media pasca Darurat Militer tidak seburuk yang terjadi pada masa konflik. Dalam tataran ini media politik sangat diuntungkan jika bermain dalam tataran "etiknya", untuk menangkis serangan-serangan provokatif, kelompok-kelompok atau lembaga yang kuat bercokol di Maluku.

Oleh karena itu kesinambungan Maluku baru sangat ditentukan oleh kifrah media politik, aksentuasinya pada opini publik yang membutuhkan kejujuran dan kegemaran menerapkan prinsip-prinsip keadilan jurnalisme. Wajar saja, jika ada sistem proteksi opini yang dilakukan oleh elit politik, kerana mereka sendiri tidak mampu menciptakan situasi yang sangat steril dari pengaruh media politik yang sangat meningkat. Bahkan ada kecenderungan menjadikan media politik sebagai alat untuk mencapai kepentingan praktisnya.

Dalam proses tertentu keberpihakan penguasa (berpihak kepada keadilan) media sudah saatnya dibuktikan lewat pemahaman, bahwa media politik adalah satu-satunya jalan untuk menetralsisir segala kebekuan politik masyarakat selama ini. Media politik tidak dapat di introdusir lewat peran sentralistik penguasa seperti halnya bidang kehumasan yang sistim kerjanya sering kali mengadopsi berbagai sumber yang sangat birokratis atau bahkan kecenderungan untuk mengungkapkan kebenaran faktual sangat relatif.

Apa yang kita harapkan dari sistim seperti ini ? media politik yang jujur dan adil adalah pilihan yang sangat mendesak, karena semua peristiwa yang terjadi menghendaki pertanggungjawaban publik, media atau jurnalisme politik yang akan melakukan suatu proses kesempurnaan pertanggungjawaban karena sumbernya vis a vis dengan masyarakat.

Dari perspektif itulah maka kepemimpinan di Maluku harus bersikap terbuka kepada semua sarana pemberitaan publik yang sudah barang tentu menjunjung tinggi nilai-nilai independensinya.

Media politik dan eksistensinya di Maluku kiranya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengagas dilema kemasyarakatan dan kebangsaan yang dewasa ini telah mengalami pergeseran paradigma. Tema-tema sensitif bahkan seksi yang tidak mampu dijangkau oleh media seperti persoalan desintegrasi semestinya menjadi santapan empuk media, ini semata-mata dalam pengembangan kreatifitas dan daya jangkau masyarakat terhadap dilema kebangsaan yang ditutup-tutupi selama ini. Media tidak semata-mata sebagai sarana provokatif seperti yang terjadi lima tahun terakhir ini dimana batas-batas primordialisme dan agama menjadi trend headline masing-masing media.

MENCARI “KEMERDEKAAN” ? BELAJAR DARI ORANG PAPUA

Oleh: Fahmi Salatalohy

Tulisan ini adalah bagian dari pengamatan saya terhadap siklus suatu republik kaya raya di pulau jawa. Kesadaran akan terungkapnya opini ini bukan berarti kita ingin menjelaskan kepada dunia bahwa pemahaman nasionalisme kita telah luntur, akan tetapi ini tak lain hanya sekedar analisa wacana, di mana dari sisi akademis sangat mendukung kemutlakan berpikir setiap orang untuk menganalisa lebih jauh apa manfaat dari semua yang telah diberikan selama ini.

Wacana ini juga mengandung nilai mutlak yang perlu disiasati sebagai sesuatu yang bernilai jual bagi penguasa. Parameternya, kita tidak menginginkan masyarakat sering terjebak oleh ketentuan dan paradigma lama, di mana penguasa adalah elemen terbesar yang tidak mampu mengimplementasikan harapan-harapan masyarakat tentang suatu tatanan hidup yang lebih berguna.

Orientasi kekuasaan yang berpusat di pulau Jawa adalah bagian dari masalah-masalah kebangsaan yang belum terpecahkan selama ini. Ketika orang berbicara desintegrasi bangsa, maka di situlah akan muncul stigma yang sangat negatif. Tidak mungkin ada negara dalam negara. Namun apa lacur, pemerintah tetap menganggap isu ini sebagai suatu ancaman terhadap integritas bangsa. Bahkan kecenderungan ini diperparah dengan ketakutan masyarakat, seakan-akan desintegrasi kebangsaan adalah dogma yang tidak boleh diperdebatkan.

Jika isu desintegrasi bangsa ini direduksi kedalam kesadaran kolektif masyarakat lokal, yang nampak dalam cita-cita tersebut adalah berupa tuntutan agar masyarakat Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke diperlakukan secara adil, tanpa mengurangi sedikitpun hak-hak kewarganegaraannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan suatu kenyataan bahwa desintegrasi bangsa adalah klaim politik pemerintah yang di tunjukkan kepada masyarakat dan sarat dengan prinsip-prinsip otoritarianisme.

Pergulatan pemikiran tentang wilayah-wilayah yang ingin dan tidak mau merdeka sudah saatnya dibedah secara ilmiah, karena dikhawatirkan term ini akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial dalam wilayah RI. Dalam konteks kebangsaan, desintegrasi adalah ancaman yang bersifat universal. Semua wilayah diperhadapkan dengan akumulasi kedaerahan yang sangat berbeda, walaupun berbeda akan tetapi tujuan yang hendak di capai adalah sama.

Tumbangnya rezim Orde Baru ditandai berbagai gejolak sosial yang mengobarkan primordialisme identitas lokal masing-masing. Konflik antar etnik di Sambas dan Sampit, Maluku dan Poso, lepasnya Timor Timur dari pangkuan RI, dan gejolak sosial yang tiada henti di Aceh dan Papua, menjadi bukti paling sahih betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikulturalisme yang dibangun Orde baru di negeri ini.

Tulisan ini hanya mengedepankan satu aspek, yaitu aspek rasionalitas perimbangan kekuasaan yang adil. Kalau ini tidak dilakukan, keyakinan saya akan menjadi benar bahwa dominasi kekuasaan Republik Jawa semakin menjelma di semua struktur. Hegemoni kekuasaan Jawa (dalam beberapa tulisan disebut proses Jawanisasi) merupakan tatanan kekuasaan yang memiliki hirarki secara multidimensi. Di semua link ketatanegaraan, hegemoni Jawa tetap memainkan peran sentral dalam kekuasaan di Republik ini. Hal ini yang menyebabkan orang-orang di luar hirarki sedang mencari kemerdekaan. Sebagai simbol kebebasan Tuhan terhadap manusia, "kemerdekaan" ibarat artefak kuno yang sangat sulit ditemukan, yang kita cari adalah "kemerdekaan" hari ini, dan entah apalagi untuk besok.

Di lorong-lorong kota, kemerdekaan dieluk-elukan, di sudut jalan kemerdekaan dipoles dengan tetesan darah, di kampus-kampus kemerdekaan selalu membahana dengan teriakan-teriakan suram yang merebak hampir di seantero podium. Di alam yang

sudah merdeka tuntutan kemerdekaan masih diwarnai dengan pertumpahan darah, bahkan mereka yang berteriak demi kemerdekaan tidak tanggung-tanggung untuk dijadikan korban. Orang yang sudah memiliki kemerdekaan tentu merasa lucu melihat tingkah laku pengemis kemerdekaan atau mereka yang tertindas selama ini, karena yang mereka tuntut tidak pernah dipenuhi oleh penguasa.

Tidak ada orang yang mampu memberikan legitimasi kepada perjuangan kemerdekaan tatkala sebagian yang lain merasa kemerdekaan itu semata-mata di kendalikan oleh penguasa. Seperti inilah barangkali situasi di negeri ini. Ini sepertinya akan ada "habis terang terbitlah gelap". Bukan tanpa keniscayaan jika kemudian kita merasa bosan dan lelah terhadap situasi bangsa yang kini kian rapuh. Kerapuhan sedang melanda semua sendi-sendi kehidupan kita, tak pelak lagi ditambah dengan percekcoakan di tingkat elit, hal ini dengan serta merta mengakibatkan masyarakat menjadi bingung dan panik.

Beberapa bulan yang lalu tepatnya Januari 2003 yang masih segar dalam ingatan kita bahwa, ketika terjadi demonstrasi untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BMM), Tarif Dasar Listrik dan Telepon, momen ini sekaligus dipergunakan oleh beberapa orang, yang saya tahu mereka berasal dari Papua. Dengan sikap tanpa ragu-ragu, para mahasiswa ini menancapkan bendera bintang kejora di bundaran Universitas Gajah Mada. Saya dan dua orang teman

mantan aktifis HMI yang melintas di area itu merasa kaget setengah mati, kami memang sudah mafhum dengan namanya isu desintegrasi, di negeri kami juga ada bendera Republik Maluku Selatan, akan tetapi bendera ini tidak dinaikkan pada saat demonstrasi menuntut turunnya harga barang atau demonstrasi apapun namanya. Bendera RMS punya momen khusus yaitu pada saat memperingati hari jadi Republik Maluku Selatan (RMS). Akan tetapi apa yang salah dibalik penancangan bendera bintang kejora tersebut ?

Tidak ada salahnya jika mereka ingin mencari kemerdekaan, yang mungkin menurut hemat mereka kemerdekaan tersebut belum diraihinya. Sama halnya dengan keterpaksaan masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Apa yang mampu mereka apresiasikan ? selain meneriakkan ketidakadilan terhadap penguasa, agar mampu keluar untuk merdeka dengan dirinya sendiri.

Saya punya keyakinan bahwa hampir lima puluh persen mahasiswa Papua yang kuliah di Yogyakarta punya idealisme untuk "memerdekakan" wilayahnya. Hal ini terbukti bahwa mereka sedang melakukan tekanan-tekanan politik kepada pemerintah, dan tidak ada satu momentum demonstrasi yang tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Papua. Mereka punya kekompakan yang luar biasa, idealisme yang utuh. Realitas politik yang diperjuangkan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Mereka punya link-link kekuasaan yang besar.

Ketika mendengar akan ada kunjungan perdana Menteri Australia John Howard ke Jakarta, momentum ini oleh rekan-rekan aktifis mereka digunakan untuk demonstrasi anti Australia, karena Australia dinilai telah mendukung Amerika melakukan invasi ke Irak. Mahasiswa dan masyarakat Papua yang ada di Jakarta punya strategi lain, tiga hari menjelang demonstrasi anti Australia, mereka melakukan demonstrasi anti pemekaran wilayah, dengan satu niat agar Howard mau mendengar aspirasi mereka. Yang terjadi adalah pada saat Howard menyampaikan pidatonya, selain Aceh, nama Papua disebut-sebut sebagai wilayah yang akan direhabilitasi bantu oleh pemerintah Australia.

Rehabilitasi Papua atau Aceh tidak akan mengubah niat masyarakat kedua wilayah ini untuk memilih opsi merdeka. Intensitas penyelesaian masalah konflik terutama konflik militer semakin menaruh dendam dan berpengaruh kuat pada proses mencari jati diri yang bebas dari tekanan, intimidasi, teror dan pembunuhan.

Apa yang diinginkan oleh orang Papua sebenarnya bukan sekedar bantuan. Mereka berharap agar Howard bisa mendengar tuntutan mereka. Membantu dan keinginan untuk merdeka adalah dua term yang secara diametral dapat dibedakan oleh orang Papua. Jadi pada saat itu pula, aparat kepolisian yang berdiri sebagai pengawal para demonstran tidak mengerti lambang bintang kejora, bahkan bendera itupun dibiarkan berdiri dengan tegap dan melambai-lambai

hampir selama satu minggu di bundaran UGM. Bendera bintang kejora atau bendera RMS adalah lambang kemerdekaan idiologi, tepatnya adalah semacam opsi untuk merdeka. Kemerdekaan ini lain dengan suatu bentuk kemerdekaan sifat, kehendak, penentuan nasib untuk keluar dari kediktatoran penguasa. Mereka ingin bebas dari kekuasaan yang menafikan hak-hak hidupnya, bebas dari eksploitasi kebudayaan, sumber alam, dan seribu satu macam hak yang telah hilang selama ini. Untuk menemukan kemerdekaan yang hakiki, semua orang harus mempersiapkan diri, bertarung habis-habisan (perjuangan untuk hidup) dengan satu niat harus merdeka. Dalam kemerdekaan itulah privatisasi kehidupan masyarakat dapat dirasakan oleh semua orang, mengurus masyarakatnya, wilayahnya dan agamanya sendiri. Konon pasca pengeboman di Bali, antusias pemerintah hampir sembilan puluh persen terkonsentrasi di daerah yang padat dengan wisata komersial itu. Indikasinya jelas, pemerintah ingin agar Bali yang traumatis itu segera dipulihkan.

Keseriusan pemerintah menangani kasus Bali ini kemudian menimbulkan kecemburuan wilayah lain yang penderitanya melebihi Bali. Di Aceh, beribu-ribu orang mati akibat pemberlakuan operasi militer sampai aktualisasi gagasan demiliterisasi yang sempat menjadi tegang. Penyelesaian secara damai kemudian akan melahirkan sugesti negatif antara masyarakat NAD dan pemerintah RI. Logikanya hampir semua masalah tidak terjamah oleh feeling pemerintah, di

Poso dan Maluku apalagi, semua ini adalah keniscayaan pahit dimana penanganannya pun seperti tambal sulam.

Pada tanggal 15 Februari 2003. Dengan beberapa orang teman berkunjung ke Markaz besar Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Yogyakarta, maksud kami untuk meminta kesediaan salah seorang tokoh yang menggantikan Ustadz Abubakar Ba'asyir untuk menyampaikan pandangannya pada acara tindak lanjut kesepakatan Malino yang diselenggarakan di Bali. Seketika itu salah seorang aktifis MMI yang asalnya dari Sulawesi, dia bercerita tentang penangkapan beberapa tokoh reformasi seperti Agus Dwikarna, Riko Marbun, Erico Guiteres, dan beberapa tokoh lain yang punya perjuangan yang sama. Menurutnya, yang menggagas Perjanjian Malino itu adalah Agus Dwikarna dan Yusuf Kalla, dia bertanya kok, Agus ditangkap ya ? dia menyesal atas perilaku rezim saat ini. Dengan semangat egaliternya, dia lanjutkan cerita.

Di Sulawesi semua masyarakat sudah sepakat jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberlakukan syari'at Islam, maka kesimpulannya mereka akan kembali ke hutan seperti sedia kala (perang). Teman-teman saya yang pluralis, hanya senyum-senyum mendengar cerita aktifis MMI tersebut. Akan tetapi ada hikmah yang dapat dipetik dari cerita tadi tentu punya kaitan dengan bergaining position masyarakat Sulawesi dengan pemerintah saat ini. Semua ini bermuara pada ketidakadilan penguasa.

Lalu apakah kita tidak mampu untuk menuntut dan menentukan kemerdekaan (minimal punya posisi tawar) secara lahir batin di wilayah kita sendiri? apakah yang kita banggakan ketika kehidupan kita dicabik-cabik oleh kekuasaan yang opportunistis? darah yang tertetes sekian banyak hanya digantikan dengan peluang otonomisasi yang kacau balau. Rakyat menderita, harga-harga melambung tinggi, muncul politikus-politikus kawakan yang minder bicara kemerdekaan sendiri, radikalisasi agama oleh kelompok-kelompok sektarian yang menimbulkan seribu satu macam keresahan di masyarakat. Ini sebenarnya adalah bagian dari tuntutan sebuah kemerdekaan, tapi apakah daya kita adalah masyarakat yang setia kepada penguasa, dan mungkin saja teriakan-teriakan kemerdekaan kita hanya sampai diujung rambut, Tuhan pun tidak dapat membantu karena kita sering mengambil alih kekuasaan-Nya.

Seperti masyarakat Papua dan Aceh kita juga telah lama menderita (bukan disaat terjadinya peristiwa 19 januari) penderitaan kultural yang berjalan sudah berabad-abad, melahirkan sikap antagonistis di kalangan kita sendiri. Hal ini terjadi akibat kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan budaya. Apa implikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut atau orang yang dipandang berlainan secara kultural dan politik tidak mampu untuk menggapai kemerdekaannya sendiri? kita belum memiliki variabel yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga sesekali

biarlah orang lain yang memerintah kita. Ada keheranan kami, disaat sultan Yogya dimahkotai dengan sebutan "Upulatu", indikator apa yang kita pakai untuk labeling gelar tersebut ? oleh karena itu, kita semestinya sudah mampu menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut demi kecerahan Maluku di masa datang.

Dalam teori inspirasi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya "Mind, Self, and Society". Menurut teori Mead, orang belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas sedemikian relevan dengan peran-peran ini yang menunjukkan satu sama lain, siapa dan apa kedudukan mereka, yang mendefenisikan situasi-situasi yang mereka jumpai dan terlibat dalam perilaku-prilaku yang berkaitan dengan identitas, makna dan situasi sosial sedemikian. Apa yang dimaksudkan oleh teori ini tidak lain adalah upaya untuk menentukan sikap, identitas diri, makna dan situasi sosial kita. Mungkin ada lebihnya kita memiliki kemampuan untuk menyongsong kemerdekaan sejati. Rentannya cara berpikir untuk mencapai kemerdekaan secara hakiki menyebabkan kita dikungkung oleh keserbalainan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Daerah lain punya semangat multietnik yang tinggi untuk keluar dari suatu penindasan kultural yang dilakukan secara sistematis oleh penguasa. Mereka ingin bebas dari suatu kendali pemerintah yang "anarkis". Anarkis politis, hukum, ekonomi dan pendidikan. Republik Jawa adalah salah satu kasus yang

sangat dominan dewasa ini. Emperium yang satu ini telah lama menguasai secara intensif batas-batas kewilayahan, mereka kenyang dan besar dari kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir untuk merumuskan suatu sarana tawar menawar dengan mereka. Republik Jawa, adalah aktualisasi dan subyektifitas dari penindasan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang dianggap ingin merdeka, seperti Riau, Sulawesi, (Manado), Papua, Aceh, dan daerah lain yang sebenarnya ingin merdeka, namun takut dicap desintegrator.

Semua ini berpulang kepada hati nurani kita, kemerdekaan memang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Yang merdeka hari ini adalah mereka yang mampu hidup layak, damai dan sejahtera.

TANGGAPAN BALIK TENTANG RAIBNYA INTEGRITAS

Oleh: Fahmi Salatalohy

Salam perjuangan !

Apa yang beta mau bicarakan ini adalah bagian dari sikap kepedulian beta terhadap budaya maluku, meskipun beta masih sependapat dengan sdr.welly, tentang masalah Maluku bukan hanya pembahasan tentang figur sosok Pattimura, atau pada bagian lain beta berani bilang bahwa masalah yang paling urgen saat ini adalah penataan struktur mental masyarakat yang semakin akut akibat konflik.

Beta juga salut terhadap, pak Berney, bung Rudi, Welly, yang begitu cermat melihat permasalahan Maluku, sampai pada detik ini pun beta sendiri tidak tahu seberapa banyak orang-orang yang concern terhadap eksistensi, katakanlah sebuah "republik" kecil yang selama ini tetap dizalimi hak-hak kemanusiaanya.

Dari permasalahan seperti itu, beta melihat bahwa ada keanekaragaman unsur-unsur budaya yang saling mendukung, baik dari unsur Islam (Arab) maupun dari unsur-unsur lokal asli dalam konteks ini saya juga sepakat dengan pak Berney, bahwa budaya Maluku jangan sampai tinggalkan, dan mati.

Pandangan yang begitu sempurna di dikemukakan oleh pak Berney akan menghasilkan sebuah paradigma baru tentang budaya Maluku, karena sampai sekarang juga orang Maluku barangkali belum tahu dengan persis bahwa proses akulturasi budayanya kebanyakan mengandung unsur-unsur dari luar. Apa yang mereka pahami selama ini adalah budaya itu hanya berada dalam dua konteks, yaitu budaya Islam dan Kristen. Pemahaman ini pun karena dilatar belakangi oleh faktor emosional, yang mengidentikkan "misalnya, di Islam, seorang anak yang sedang memegang gitar orang tuanya selalu mengidentikkan dia dengan orang Kristen. nah, para orang tua berasumsi bahwa, gitar itu sendiri adalah suatu perbuatan setan, siapa yang petik gitar, berarti dia memanggil setan. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengembangkan suatu budaya yang didalamnya masih terdapat stigma warisan yang sangat "kolot" dan tidak ilmiah bahkan tidak modern seperti itu.

Dalam hal ini barangkali saya berbeda dengan pak Berney, bahwa budaya-budaya yang menjadi atau yang diimpor dari luar, seperti musik jass, dan lain-lain itu, masih sangat sulit mendapat kedudukan dalam situasi

dimana paradigma masyarakat masih sangat rendah tentang seni.


Oleh karena itu beta sangat berharap bahwa, dekonstruksi terhadap budaya Maluku harus melepaskan unsur-unsur Arabisme atau keislaman lainnya, karena menurut saya budaya-budaya itu tidak identik dengan "asas" di mana orang Maluku sendiri mampu berkreasi, tanpa harus mengadopsi budaya luar lainnya.

Coba kita bandingkan, kalau misalnya, dua suguhan seni yang dipentaskan malam itu yaitu Samra, Dana-Dana dan Bambu Gila atau yang lainnya, apa yang lebih menukik dalam jiwa ? sungguh itu semua sangat jauh dari suatu bentuk kesempurnaan budaya lokal. Oleh karena itu beta tidak mau berpikir hitam putih, dimana budaya Maluku hanya mampu diwariskan dari generasi ke generasi karena hasil adopsi dari unsur lain. Kita kaya dengan sumber-sumber kebudayaan, karena itu harus ada agenda dekonstruksi terhadap budaya Maluku. Agar hasilnya menjadi kesempurnaan bagi generasi di masa datang.

salam perjuangan untuk.....Merdeka.

Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia



Buku yang ditulis oleh generasi muda Indonesia asal Maluku ini menjadi menarik, sebab ia lahir dari sebuah kesadaran sejarah yang muncul secara sangat kuat sebagai akibat dari penderitaan panjang yang disebabkan oleh disintegrasi yang nyaris sempurna yang terjadi selama kurang lebih tiga tahun di Maluku. Di sinilah sebenarnya letak kekuatan buku ini, karena di samping ia lahir sebagai percikan permenungan dari anak-anak muda terdidik yang memiliki kesadaran sejarah yang tinggi, tetapi lebih dari itu, buku ini sesungguhnya merupakan cerminan dari kerinduan akan integrasi nasional maupun lokal, yang sebenarnya ada dalam dada setiap orang Maluku, sebagaimana semboyan dari Saparua: "Salam Sarane karja rame-rame" (orang Islam dan Kristen bekerja bersama-sama).

(Said Tuhuleley)

ISBN 979-98101-0-8

